

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyembunyikan sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pengaturan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan perlindungan.

Obat merupakan bagian penting dalam upaya kesehatan, maka dari itu harus di upayakan agar selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Masalah ketersediaan obat selalu terjadi pada setiap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota setiap tahun. Ketersediaan obat yang berlebih (overstock) dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan berpotensi mengalami kadaluarsa atau kerusakan. Ketersediaan obat yang kurang (stockout) dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kesehatan.

Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten berupaya meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sangatlah diperlukan optimalisasi pemanfaatan dana, efektivitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian di Instalasi Farmasi adalah suatu bagian/unit/devisi atau fasilitas tempat penyelenggara semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang di tunjukan untuk keperluan dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan (Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, 2010 hal. 7)

Instalasi Farmasi merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Dinas kesehatan di bidang pelaksanaan, perencanaan ketersediaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi obat yang di perlukan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas (Jurnal Promotif Preventif 2020 hal 96).

Pada penelitian awal penulis, UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten menghadapi persoalan pada Indikator Ketersediaan Obat Essensial di Kabupaten yaitu tidak berimbang antara perencanaan ketersediaan obat dengan pelaksanaan pengadaan obat, terbatasnya anggaran pengadaan obat dan kemampuan penyedia obat /distributor yang memyediakan obat (Jurnal Biofarmasetika Tropis 2020 hal 73).

Beberapa hasil penelitian ketersediaan obat essensial, masih banyak beberapa Kabupaten/Kota yang ketersediaan obatnya masih tidak sesuai. Hasil penelitian Putranti (2016) terdapat beberapa obat yang tidak di butuhkan tetapi tersedia di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta serta belum mengutamakan pengadaan obat yang mengacu pada DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional).

Pentingnya pengelolaan perencanaan Indikator Ketersediaan Obat Essensial di UPTD Farmasi Kabupaten dalam mencapai kesehatan yang mencukupi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari perencanaan ketersediaan obat di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, maka Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam manajemen pelaksanaan kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah membangun dan mengembangkan aplikasi e-Logistik, yaitu aplikasi pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang digunakan dalam manajemen pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaporan, pencatatan, dan pemantauan ketersediaan obat dan BMHP.

Persentase Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota yang merepakan aplikasi logistik obat dan BMHP mengalami peningkatan yang signifikan dari 20,26% di tahun 2017 menjadi 40,51% di tahun 2019. Keberhasilan penerapan aplikasi e-Logistik memerlukan partisipasi dan peran aktif baik Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Untuk itu koordinasi yang optimal sangat diperlukan, apalagi dengan banyaknya sistem manajemen logistik obat dan BMHP yang dibangun sendiri oleh daerah, menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan bridging dengan aplikasi e-Logistik sehingga data tetap dapat diperoleh secara rutin.

Penyelesaian penyusunan peraturan menteri kesehatan tentang Instalasi Farmasi Pemerintah sebagai pedoman dan standar dalam pengelola obat dan alat kesehatan (alkes) di Instalasi Farmasi Pemerintah menjadi sebuah tantangan tersendiri. Walaupun demikian, persentasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar mengalami peningkattan yang signifikan, dari 57,34% di tahun 2015 menjadi 92,02% di tahun 2019.

Upaya pemenuhan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan memerlukan data dan informasi yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan. Data tersebut dapat diperoleh melalui pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan yang memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi yang ada, antara lain item obat dan perbekalan kesehatan yang di butuhkan dan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini, pengelolaan ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten menjadi lebih optimal agar fungsinya dapat berjalan lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimanakah ketersediaan obat di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Selama 2 Tahun terakhir (2021-2022) apakah tercukupi, berlebih atau kurang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ketersediaan obat di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Selama 2 tahun terakhir (2021-2022).

2. Tujuan Khusus :

Mengevaluasi ketersediaan obat esensial Indikator Ketersediaan Kabupaten (IKK) kebutuhan di UPTD Farmasi Dinkes selama 2 tahun terakhir (2021-2022).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada :

1. Bagi UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan ketersediaan obat di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Bagi peneliti, Penelitian ini untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang analisis ketersediaan obat yang ada di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten agar dapat di aplikasikan untuk masa yang akan datang.
3. Bagi penelitian lain Penelitian ini sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai ketersediaan obat esensial di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten.